

## **Peran Pemerintah Mendorong Ekonomi Lokal di Masa Pandemi Melalui Pemberdayaan Pengrajin Sasirangan Kabupaten Balangan**

**Latifa Suhada Nisa<sup>1\*</sup>, Dewi Siska<sup>2</sup>, Herry Azhar Pradana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

\*email: tivasn@gmail.com

### ***Abstract***

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the economy of Indonesia and South Kalimantan, and Balangan Regency is no exception. One of the efforts made by the government to improve the economy in the Balangan Regency is through the MSME development program, through the empowerment of sasirangan artisans. This study aims to analyze the appropriate pattern of assistance for sasirangan artisans so that the empowerment program is effective in improving their economy and can be sustainable. This research uses a descriptive qualitative method with Reflective, Recursive Design and Development Model (R2D2) analysis tools. This R2D2 model uses four components, namely: definition, design, development, and dissemination. The criteria for mentoring patterns are grouped into three: the provision of training programs, business facilitation, and financial assistance. The design of the mentoring pattern is done by dividing the target of mentoring into two groups, namely new entrepreneurs Sasirangan and existing entrepreneurs, with a focus on MSMEs advancing to class. The results of this study indicate that the existing mentoring pattern is still ineffective in improving the sasirangan artisans' skills in marketing and product development, so it has not had a direct impact on the economy of the sasirangan artisans. In addition, the training and business facilitation pattern has not yet targeted a wider group and is only focused on the artisans overseen by the relevant government agencies.

### **Keywords:**

*Business Assistance; SMEs Empowerment; Sasirangan Craftsmen.*

### **Abstrak**

Pandemi covid-19 membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan, tidak terkecuali di Kabupaten Balangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Balangan adalah program pengembangan UMKM melalui pemberdayaan para pengrajin sasirangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pendampingan yang sesuai bagi para pengrajin sasirangan agar program pemberdayaan yang diberikan efektif dalam meningkatkan perekonomian mereka dan dapat berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat analisis *Reflective, Recursive Design and Development Model* (R2D2). Model R2D2 ini menggunakan empat komponen yaitu: pendefinisian, desain, pengembangan, dan penyebarluasan. Kriteria pola pendampingan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemberian program pelatihan, fasilitasi usaha, dan bantuan keuangan. Desain pola pendampingan dilakukan dengan membagi target pendampingan menjadi dua kelompok, yaitu wirausaha baru Sasirangan dan wirausaha yang sudah ada dengan fokus UMKM naik kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pendampingan yang ada masih belum efektif dalam meningkatkan keterampilan para pengrajin sasirangan dalam hal pemasaran dan pengembangan produk, sehingga belum berdampak langsung pada perekonomian para pengrajin sasirangan. Selain itu, pola pelatihan dan fasilitasi usaha juga belum menjangkau kelompok yang lebih luas, dan hanya terpaku pada binaan dinas terkait.

### **Kata Kunci:**

*Pendampingan Usaha; Pemberdayaan UMKM; Pengrajin Sasiran*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal berdampak positif khususnya bagi masyarakat karena dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dalam pengembangan ekonomi lokal, pemerintah bersama dengan masyarakat mendorong aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Susanti, Hanafi, & Romula, 2013). Ekonomi lokal merupakan salah satu strategi yang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi. Di sisi lain, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejauh ini dianggap instrumen yang penting dalam menciptakan lapangan kerja. UKM terdiri dari para pengusaha mikro seperti petani, pedagang, hingga pabrikan lokal yang merupakan inti pembangunan ekonomi lokal.

Pandemi covid-19 membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, juga Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berkontraksi 1,81%(yoy), lebih rendah dibandingkan 2019 yang tumbuh

4,08%(yoy) (BI, 2021). Adanya pemberlakuan (Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi) secara otomatis juga membatasi aktivitas ekonomi. Dunia usaha terpukul karena daya beli masyarakat menurun yang diakibatkan menurunnya sumber pendapatan. Sebagian usaha berskala menengah dan besar mengambil kebijakan merumahkan pekerja hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada situasi ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencoba bertahan. Muncul pula usaha baru yang memanfaatkan pemasaran secara daring. Banyak usaha jenis ini yang dapat bertahan dan berhasil di tengah pandemi. Hal ini karena sifatnya yang fleksibel, baik dari sisi waktu produksi maupun pemasaran. Kinerja sektor UMKM pada triwulan IV 2020 diketahui membaik, dilihat dari adanya peningkatan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020, dengan risiko kredit yang juga membaik (BI, 2021).

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa UMK bisa lebih cepat pulih di berbagai kondisi perekonomian karena cepat menyerap tenaga kerja dan sifat fleksibelnya sehingga dapat mendorong nilai konsumsi di masyarakat. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi sebagai penyedia lapangan kerja terbanyak,

membantu pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan, khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Pratiwi, Aisyah, & Saputra, 2020). Dampaknya tentu saja positif terhadap roda perekonomian.

Hasil survei Covid-19 terhadap Pelaku Usaha mencatat, dari 436 usaha di Kalimantan Selatan yang berpartisipasi, UMK yang mengaku pendapatannya usahanya menurun sebesar 71,80 persen. Sedangkan UMB pada angka yang lebih besar, hampir 80 persen. Sebaliknya UMK yang mengaku pendapatannya meningkat sebesar 3,49 persen. Sementara UMB hanya 2,17 persen yang pendapatannya meningkat. Ini artinya, meskipun sama-sama terdampak, namun UMK lebih sedikit terdampak dibandingkan UMB (BPS, 2020).

Dampak Covid-19 ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Balangan. Terkait hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pencatatan terhadap usaha dan pekerja yang terdampak. Setidaknya ada 45 UMKM dan 60 pekerja UMKM di Kabupaten Balangan yang dilaporkan terdampak. UMKM bagi Kabupaten Balangan adalah penyokong ekonomi masyarakat, karena UMKM masih menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Balangan.

Pemerintah Kabupaten Balangan di bidang ekonomi, berkomitmen terus menumbuhkan kembangkan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini terlihat dari jumlah pelaku dunia usaha di Kabupaten Balangan, khususnya sektor industri UMKM yang terus mengalami penambahan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun pada masa pandemi, UMKM jelas mendapatkan tantangan yang luar biasa. Meski pandemi masih berlangsung, pelaku UMKM di Kabupaten Balangan yang bergerak di bidang usaha industri rumahan (*home industry*) diharapkan dapat bertahan. UMKM harus terus mendapatkan motivasi baik dari pelaku UMKM itu sendiri maupun dari Pemerintah Daerah, agar peran UMKM dapat terus berkembang dalam perekonomian daerah.

Potensi ekonomi lokal yang mampu menjawab fenomena tersebut dan memperlihatkan perkembangan pesat di Kabupaten Balangan adalah industri kain Sasirangan. Produk kain yang dihasilkan merupakan hasil karya cipta yang mengangkat lokalitas, keunikan dan memiliki nilai jual. Kesiapan untuk berkompetisi di pasar global masih diperlukan, salah satu yang utama adalah meningkatkan daya saing produk dengan kemampuan berinovasi dalam segala proses dari hulu hingga ke hilirnya. Perkembangan usaha Sasirangan di Kabupaten Balangan diharapkan mampu meningkatkan perannya dan memberikan kontribusi

yang besar dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Adapun kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan tahun 2016 – 2021 yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal terdapat pada misi RPJPD Kabupaten Balangan, yaitu mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Salah satu dari tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya peranan UMKM serta Koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program pengembangan UMKM, yaitu melalui pemberdayaan para pengrajin sasirangan.

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun pengembangan UMKM tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap pergeseran skala usaha dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah dalam satu dekade terakhir (Wibowo, et al., 2021). Padahal, disisi lain pemerintah telah banyak melakukan program pemberdayaan. Hal ini bisa menjadi indikasi ketidaktepatan program maupun sasaran dan pola pendampingan (Suhombing, 2018). Model

pengembangan UMKM umumnya bersifat *project based* semata, hal ini tentunya tidak akan menghasilkan penguatan dan pemberdayaan UMKM yang nyata. Masyarakat memerlukan pola pendampingan yang baik terstruktur, dan berkesinambungan serta progresnya tercatat (Sari, 2019). Oleh karena itu pola pendampingan yang tepat perlu dirumuskan agar program pemberdayaan yang diberikan efektif dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM dan dapat berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kuesioner, dan FGD. Data sekunder bersumber dari data dan informasi laporan dinas dan dokumen terkaitnya lainnya. Penentuan model pendampingan dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Reflective, Recursive, Design and Development Model* (R2D2). Model R2D2 ini menggunakan empat komponen yaitu: (1) pendefinisian, (2) desain, (3) pengembangan, dan (4) penyebaran (Yunani, Pradana, Rahmatullah, Maulida, & Chairina, 2022).

Pendefinisian dilakukan dengan menetapkan/mengklasifikasikan jenis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Balangan, yaitu

program pelatihan, fasilitasi usaha, dan bantuan keuangan. Tiga jenis pemberdayaan ini merupakan jenis pemberdayaan yang paling sering dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Desain pola pendampingan dan pengembangan dilakukan dengan mengelaborasi pola pendampingan yang ada dengan kebutuhan pelaku usaha, dimana pengumpulan datanya dilakukan melalui FGD yang melibatkan Dinas UMKM, perindustrian, dan perdagangan Kab. Balangan, perwakilan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*), komunitas pengrajin sasirangan, dan pelaku usaha sasirangan. Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi pola pendampingan kepada pihak terkait dan pelaku usaha Sasirangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan Pengrajin Sasirangan di Kabupaten Balangan**

Jenis pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1) Program pelatihan, 2) Fasilitasi Usaha, 3) Bantuan Keuangan. Pengelompokan ini didasarkan pada observasi jenis pelatihan yang diterima oleh pengrajin Sasirangan dan telaahan dokumen terhadap jenis pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Balangan. Adapun kebutuhan pengembangan usaha diperoleh berdasarkan hasil FGD dengan pelaku usaha sasirangan (Tabel 1).

**Tabel 1.** Identifikasi Bentuk Pemberdayaan dan Kebutuhan Pengembangan Usaha Sasirangan

<b>Jenis Pemberdayaan</b>	<b>Bentuk Pemberdayaan</b>	<b>Kebutuhan Pengembangan Usaha</b>
Program Pelatihan	Pelatihan produksi/pembuatan sasirangan (menjelujur, mewarna, menjahit) Pelatihan desain sasirangan Pelatihan pewarnaan Pengolahan warna alam Pelatihan pemasaran digital Pelatihan keuangan usaha Pelatihan manajemen usaha Pelatihan kemasan	Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan/diversifikasi produk kain sasirangan Sertifikasi dan standarisasi produk Pelatihan Teknik Pewarnaan menggunakan pewarna alam Kurasi Produk Sasirangan Pembuatan proposal pinjaman
Fasilitasi Usaha	Bantuan set peralatan Pendampingan pendaftaran usaha Pameran/expo	Penyediaan bahan baku produksi kain sasirangan sesuai dengan kebutuhan UMKM Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha Fasilitasi konsultasi usaha Fasilitasi pendaftaran HKI
Bantuan Keuangan	Bantuan Modal Langsung	Perluasan akses modal kerja Fasilitasi pembiayaan

Sumber: Data primer diolah (2019)

### **Program Pelatihan**

Peran Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memberdayakan pengrajin Sasirangan dapat dilihat dari sejumlah program pelatihan yang diberikan oleh SKPD terkait, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan (Tabel 1). Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, program pelatihan yang diberikan dinas terkait lebih mengarah pada bagian hulu, yaitu pada program pelatihan keterampilan dasar yang fokus pada produksi sasirangan, pelatihan belum menysasar pada pengembangan atau diversifikasi produk kain sasirangan.

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa pengrajin Sasirangan di Kabupaten Balangan umumnya masih memproduksi Sasirangan dalam bentuk kain, dan pakaian jadi. Minimnya diversifikasi produk Sasirangan, menyebabkan kurangnya daya saing produk Sasirangan Kabupaten Balangan, jika dibandingkan dengan produksi dari Kabupaten lain. Selain keberagaman produk, desain pola, motif, dan warna Sasirangan juga menentukan minat atau daya tarik masyarakat untuk membeli produk Sasirangan. Selain itu, dengan semakin modernnya bentuk desain, pola, dan teknis pewarnaan, para pengrajin yang ada belum begitu menguasai teknik dasar untuk dapat memenuhi kebutuhan calon konsumen. Oleh karena itu diperlukan pelatihan desain, pola, dan

pewarnaan sasirangan yang lebih intensif dan rutin.

Pelatihan pewarnaan juga diharapkan tidak hanya sebatas penggunaan pewarnaan sintesis saja, tetapi juga harus memperkenalkan penggunaan bahan alam, karena seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan preferensi masyarakat untuk lebih sadar akan penggunaan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan untuk komoditas tekstil. Hal ini juga secara tidak langsung meningkatkan daya saing produk sasirangan, dibandingkan dengan produk kain lokal lainnya yang masih menggunakan pewarna sintetis. Peningkatan daya saing sasirangan juga dapat dilakukan dengan memproduksi Sasirangan yang terstandar dan tersertifikasi, baik dari segi pengolahan, pemilihan bahan, dan pewarna.

Kekurangan dari program pelatihan yang sudah ada, selain jenis pelatihan lebih dominan pada pelatihan keterampilan dasar adalah waktu yang digunakan untuk pelatihan relatif singkat untuk pengembangan keterampilan, fokus pelatihan juga terbatas pada kelompok binaan saja, belum menysasar pada masyarakat luas. Hal ini menyebabkan minimnya penambahan jumlah pengrajin Sasirangan, sehingga pelaku usaha Sasirangan yang sudah ada cenderung kekurangan tenaga kerja dan tidak bisa memenuhi permintaan Sasirangan pada saat permintaan tinggi. Selain itu, belum adanya standarisasi

keterampilan yang dapat menjadi acuan menjadikan sulitnya pengelompokan para pengrajin dari yang masih pemula, intermedite, dan terampil atau ahli. Pengelompokan ini sangat penting, agar pola pelatihan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, menyasar target pengrajin yang dituju. Pola ini juga memungkinkan para pengrajin dapat terus dipantau tingkat keterampilannya, sehingga dimungkinkan untuk pelaksanaan program pelatihan lanjutan yang berkesinambungan.

Untuk meningkatkan akses pasar, pelatihan pemasaran digital juga sudah pernah dilakukan namun tidak secara khusus ditujukan untuk pelaku usaha Sasirangan, tetapi bergabung dengan pelaku usaha lainnya. Minimnya waktu pelatihan dan banyaknya peserta pelatihan, menyebabkan kurang fokusnya pelatihan. Sehingga peningkatan keterampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga terjadi pada jenis pelatihan lainnya. Pelatihan seharusnya lebih banyak melakukan praktik langsung dibandingkan dengan pemaparan teori semata.

Praktik pelatihan pemasaran digital juga sedikit keliru, karena mengharapkan para peserta yang belum familiar dengan konsep pemasaran digital harus terjun langsung membuat konten, mengembangkan konsep, sampai menyiapkan promo berbayar atau strategi secara organik. Pemerintah sebagai fasilitator pelatihan pemasaran

digital, terkesan menggampangkan proses belajar dan adopsi digital para pengrajin. Para pengrajin secara umum masih belum memiliki akun media sosial dan belum familiar menggunakan fitur-fitur yang ada. Proses *Go-Digital* pun masih terkendala adanya beberapa *blank spot* di beberapa wilayah di Kabupaten Balangan. Secara umum pelatihan *Full-Stack Digital Marketing* memiliki durasi 3-6 bulan dengan berbagai latihan dan tugas yang mesti diselesaikan. Hal ini menjadikan pola pelatihan pemasaran digital yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi tidak relevan, karena tidak memiliki KPI (*Key Performance Indicator*) yang jelas dan output kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penelitian Salman (2021) diketahui bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Balangan masih belum memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Saat ini, pelatihan manajemen usaha untuk pelaku usaha Sasirangan sudah pernah dilakukan. Namun, masih banyak yang belum mampu menaikkan kemampuan manajemennya dan ini diharapkan menjadi konsen pemerintah daerah untuk bisa terus mengembangkan Usaha UMKM.

Pelatihan manajemen usaha seharusnya dapat mengundang *industry expert* sebagai pembicara sehingga dapat membagikan pengalaman usaha yang serupa dan dapat direplikasi oleh para pengrajin sasirangan. Pelatihan

manajemen usaha sebenarnya juga sangat luas, mencakup administrasi keuangan, operasional usaha, produksi dan rantai pasok, *quality control*, aspek legalitas usaha, manajemen SDM, sampai administrasi usaha lainnya. Hal ini berdampak pada luasnya cakupan pelatihan dan materi yang disiapkan bagi para pengrajin. Jika pola pelatihan manajemen usaha dapat dijalankan dengan kurikulum yang jelas, maka output kegiatan pelatihanpun akan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan awal.

### **Fasilitasi Usaha**

Fasilitasi usaha yang dimaksud di sini adalah pemberian peralatan yang diperlukan dan menunjang proses produksi Sasirangan dan fasilitasi proses hilirisasi produk sampai dengan produk masuk ke tahapan pemasaran. Fasilitasi usaha juga meliputi fasilitasi pemasaran/promosi produk, pendampingan legalitasi, sertifikasi produk hingga fasilitasi pendaftaran HKI. Sejauh ini, program yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan, baru berupa pemberian peralatan penunjang proses produksi saja, seperti pemberian set peralatan untuk mewarna, menjahit, dan menjelujur.

Pemasaran/promosi produk dilakukan melalui fasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran/expo tingkat lokal, provinsi maupun *event-event* nasional, dan penyelenggaraan lomba membuat motif Sasirangan khas

Balangan. Pemerintah juga sudah memberikan pendampingan pendaftaran usaha, sehingga UMKM yang belum mendapatkan izin usaha lebih teredukasi dan mudah melengkapi persyaratan izin usaha yang diperlukan. Fasilitasi usaha yang belum diberikan adalah fasilitasi/pendampingan pendaftaran HKI dan fasilitasi pembinaan kemitraan dan jejaring usaha.

Selain fasilitasi yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku usaha Sasirangan, mereka juga mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk produksi Sasirangan, seperti kain, benang, dan bahan pewarnaan karena tidak adanya pensuplai bahan baku.

Selama ini, pengrajin kain Sasirangan mendapatkan bahan baku dari pelaku usaha Sasirangan yang lebih besar, namun pembelian tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar. Selain dengan cara tersebut, pengrajin harus mendatangkan bahan baku dari luar kota, yang mana berarti pengrajin kain sasirangan harus menambah biaya untuk ongkos kirim bahan. Sementara itu, jumlah bahan baku yang dibeli tidak sebanding dengan mahalannya ongkos kirim bahan. Hal ini otomatis menambah biaya produksi dan berdampak pada naiknya harga produk Sasirangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan fasilitasi penyediaan bahan baku sasirangan melalui koperasi atau BUMDes.



### **Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan yang dimaksud di sini adalah bantuan modal baik berupa bantuan langsung tunai maupun kemudahan akses terhadap permodalan. Bantuan modal yang diberikan pemerintah daerah saat ini berupa insentif atau bantuan langsung tunai. Jenis bantuan ini cocok diterapkan bagi wirausaha baru, namun bagi wirausaha yang sudah berkembang diperlukan akses yang lebih terhadap permodalan.

Permodalan dan aspek pembiayaan diakui masih menjadi permasalahan utama yang dialami oleh UMKM Sasirangan di Kabupaten Balangan. Pada umumnya mereka belum memiliki kemudahan akses permodalan dibandingkan dengan skala usaha lain yang lebih besar. Maka perlu dibuat skema bantuan permodalan yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan dan lembaga pemerintah yang sesuai dengan kinerja dan kapasitas usaha Sasirangan yang sedang dijalankan.

Lembaga Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka optimalisasi pembiayaan UMKM, dikarenakan model pembiayaan yang fokus kepada para pelaku usaha dan UMKM yang secara teknis termasuk dalam kategori “*unbankable*”, sehingga sulit mendapatkan pendanaan ataupun pembiayaan melalui jalur formal seperti

Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.

Pemerintah sudah sewajarnya melibatkan fasilitator dari kalangan perbankan untuk dapat menjadi mentor dalam program pelatihan keuangan. Hal ini sangat penting, karena pihak perbankan dapat menjabarkan secara jelas mengenai profil usaha seperti apa yang dapat dibiayai oleh pihak bank, bagaimana cara mendapatkannya, apa saja syarat-syaratnya, sampai berapa biaya bunga yang harus dibayarkan, serta simulasi kredit nya. Selain itu, pihak perbankan biasanya juga memiliki binaan UMKM masing-masing, sehingga merekapun sebenarnya berkepentingan untuk mentransformasi UMKM menjadi UMKM yang *bankable* dan layak untuk mendapatkan bantuan pembiayaan.

### **Desain Pola Pendampingan**

Pendampingan tidak hanya dilakukan untuk UMKM yang telah ada, tetapi juga perlu dilakukan untuk calon wirausaha atau dalam konteks ini disebut dengan wirausaha baru, yang dimulai dari pembuatan konsep bisnis (Sudrajat, 2020). Pola pendampingan yang baik akan meningkatkan pengembangan usaha UMKM yang berdampak pada peningkatan mutu dan jumlah produksi (Salman, 2021). Berdasarkan kondisi eksisting, dan kebutuhan pengembangan usaha sasirangan diketahui bahwa keterampilan yang dimiliki, sarana dan prasarana, serta kebutuhan masing-

masing UMKM sangat bervariasi. Oleh karena itu agar program pelatihan yang diberikan menjadi tepat sasaran, maka pola pendampingan dikelompokkan menjadi 2 (dua), sesuai dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaku sasirangan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Wirausaha baru, adalah mereka yang baru memiliki keterampilan awal dalam proses pembuatan Sasirangan dan memiliki keinginan untuk membuka usaha di bidang kerajinan ini. Wirausaha baru ini kemungkinan berada di klaster baru yang perlu dibantu untuk melengkapi teknologi alat ataupun keterampilan tahap dasar sambil dipantau perkembangannya.
- (2) UMKM Sasirangan naik kelas, adalah mereka yang telah memiliki pengalaman riil sebagai *entrepreneurs*, memiliki kompetensi ke depan baik skill individunya ataupun lembaga usahanya, legalitas usaha, telah mendapatkan pendampingan sebelumnya dari lembaga pemerintah ataupun swasta, serta memiliki akses bahan baku hingga pemasaran.

Pola pendampingan yang akan diberikan kepada UMKM Sasirangan di Kabupaten Balangan harus berdasarkan kebutuhan masing – masing UMKM yang memiliki kapasitas dan kinerja usaha yang berbeda. Oleh karena itu, selain membagi target pendampingan menjadi Wirausaha baru Sasirangan dan

UMKM Sasirangan naik kelas, untuk pola pendampingan lebih lanjut dilakukan kategorisasi pola pendampingan berdasarkan skala usaha dengan menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan atau *competency-based*. Berdasarkan hasil dari kajian analisa usaha UMKM Sasirangan di Kabupaten Balangan melalui FGD, kategori yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Kategori 1 adalah usaha-usaha yang baru tumbuh dan belum berkembang dengan modal terbatas, usaha baru dimulai 6 bulan - 1 tahun terakhir, kemampuan SDM masih terbatas, atau pelaku usaha telah lama vakum dan baru memulai kembali usahanya. Pada kategori ini juga biasanya didapati para pelaku UMKM belum memiliki konsep usaha yang jelas, belum memiliki *brand*/merek dagang, serta belum merasakan keuntungan usaha dikarenakan biaya usaha yang dikeluarkan diawal;
2. Kategori 2 adalah usaha-usaha yang sudah ada traksi, mulai memiliki pendapatan yang stabil, serta konsumen tetap, namun secara khusus pasar utamanya adalah masih pasar lokal di Balangan dan sekitarnya. Pada kategori ini, para pelaku usaha sudah mulai mendaftarkan usahanya, telah memiliki NPWP, serta kebanyakan sudah mulai memiliki *brand*/merek dagang sendiri;

3. Kategori 3 adalah usaha-usaha yang sudah mulai memiliki pasar dengan cakupan pasar yang lebih luas (lokal, regional dan nasional), telah terdaftar usahanya (memiliki legalitas), beberapa memiliki keunggulan komparatif tersendiri, desain dan motif unik dan didesain sendiri oleh pelaku usaha, telah memiliki *website* dan media sosial sendiri, telah bergabung di *marketplace*;

Berdasarkan hasil survei kuesioner, UMKM Sasirangan di Kabupaten Balangan pada umumnya masih berada di tataran kategori 1 dan 2 sehingga perlu diberikan stimulus dan pendampingan untuk naik ke kategori selanjutnya. Pengkategorian tersebut akan dijadikan acuan dalam pemberian

pendampingan yang berpengaruh pada tahapan langkah pengembangan usaha. Kategori usaha tersebut dibutuhkan sebagai dasar bagi instansi pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan bimbingan teknis pendampingan bagi UMKM yang ada di Kabupaten balangan.

### **Pengembangan Pola Pendampingan**

Bentuk pemberdayaan yang diberikan pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi eksisting dari pengrajin sasirangan. Agar pelaksanaan program lebih sistematis dan terarah, maka pelatihan, fasilitasi usaha, maupun bantuan keuangan harus diberikan sesuai dengan pengelompokan dan kategorisasi pelaku usaha sasirangan.

**Tabel 2.** Desain Pola Pendampingan

<b>Pola Pendampingan</b>	<b>Jenis Pemberdayaan</b>	<b>Bentuk Pemberdayaan</b>
Wirausaha Baru	a. Program Pelatihan	- Pelatihan keterampilan dasar (menjelujur, mewarna, menjahit) - Pelatihan desain sasirangan - Pelatihan kewirausahaan
	b. Fasilitasi Usaha	- Pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha - Pendampingan pendaftaran/legalitas usaha - Penyediaan bahan baku produksi kain sasirangan sesuai dengan kebutuhan UMKM - Kurasi produk - Fasilitasi konsultasi usaha
	c. Bantuan Keuangan	- Bantuan permodalan/insentif
UMKM Naik Kelas Kategori 1	a. Program Pelatihan	- Pelatihan peningkatan keterampilan dasar - Pelatihan Teknik Pewarnaan menggunakan pewarna alam & sintetis

Kategori 2	b. Fasilitasi Usaha	- Pelatihan pembuatan kemasan produk
		- Pelatihan diversifikasi produk sasirangan
		- Pelatihan perencanaan bisnis
		- Pelatihan strategi pemasaran ( <i>branding</i> , distribusi, media promosi, segmentasi, targeting).
		- Penyediaan bahan baku produksi kain sasirangan sesuai dengan kebutuhan UMKM
		- Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/expo/event-event nasional
	c. Bantuan Keuangan	- Kurasi Produk
		- Konsultasi usaha
		- Bantuan permodalan/insentif
	a. Program Pelatihan	- Perluasan akses modal kerja
		- Pelatihan pemasaran digital
		- Pelatihan keuangan usaha
- Pelatihan manajemen usaha; Pembukuan usaha		
- Pembuatan proposal pinjaman		
b. Fasilitasi Usaha		- Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/expo/event-event nasional
		- Kurasi Produk
		- Konsultasi usaha
c. Bantuan Keuangan		- Pembinaan kemitraan dan jejaring usaha
	- Bantuan permodalan/insentif	
	- Pinjaman modal kerja	
Kategori 3	a. Program Pelatihan	- Fasilitasi pembiayaan UMKM melalui Koperasi dan BUMDes
		- Pelatihan pembuatan pewarna alami sasirangan
		- Inovasi produk dan proses
	b. Fasilitasi Usaha	- Pengenalan Sistem Standarisasi Nasional atau SSN dan Standar Nasional Indonesia atau SNI terhadap UMKM
		- Pembinaan sertifikasi dan standarisasi produk
		- Pendampingan sertifikasi SNI
	c. Bantuan Keuangan	- Pinjaman modal kerja
		- Penjaminan dan pemberian rekomendasi kredit/pinjaman bagi UMKM yang layak dan memenuhi persyaratan teknis namun masih belum “bankable”

## KESIMPULAN

Pola pemberdayaan pengrajin Sasirangan yang ada di Kabupaten Balangan masih belum efektif dalam

meningkatkan keterampilan para pengrajin sasirangan sehingga belum berdampak langsung pada perekonomian para pengrajin

sasirangan. Selain itu, pola pelatihan dan fasilitasi usaha juga belum menjangkau kelompok yang lebih luas, dan hanya terpaku pada binaan dinas terkait. Agar pelaksanaan pemberdayaan lebih sistematis dan terarah, maka pelatihan, fasilitasi usaha, dan bantuan keuangan harus diberikan sesuai dengan pengelompokan dan kategorisasi pelaku usaha sasirangan. Pola pendampingan pengrajin Sasirangan didesain dengan membagi pengrajin Sasirangan ke dalam dua kelompok target pendampingan berdasarkan kebutuhan keterampilan, yaitu wirausaha baru Sasirangan dan wirausaha yang sudah ada dengan fokus UMKM naik kelas. UMKM naik kelas dikelompokkan lagi menjadi 3 kategori berdasarkan kapasitas usahanya. Berdasarkan kategori yang disusun, pengrajin sasirangan di Kabupaten Balangan berada pada kategori 1 dan 2. Perbedaan pengelompokan dan kategori menentukan jenis pemberdayaan yang akan diterima oleh pengrajin sasirangan. Desain pola pendampingan perlu diterapkan dan ditindaklanjuti dengan evaluasi dan monitoring dengan tujuan melihat ketercapaian dan keberhasilan pelaksanaan, untuk kemudian dilakukan perbaikan desain pola pendampingan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BI. (2021). Laporan Perekonomian Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Bank Indonesia.
- BPS. (2020). Survei Covid-19 terhadap Pelaku Usaha. Badan Pusat Statistik.
- Pratiwi, M. A., Aisyah, N., & Saputra, F. E. (2020). Kondisi dan Strategi UMKM di saat Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Seminar Nasional Seri Ke 4 Program Studi Magister Manajemen. Pontianak.
- Salman, M. (2021). Pengaruh Kemampuan Manajemen dan Pola Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Melalui Jejaring Pasar (Studi Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Balangan). *Kindai*, Vol 17 Nomor 2, 192-212.
- Sari, Y. P. (2019). Model Pendampingan Umkm Pengolahan Hasil Laut dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. *Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1*, 293-302.
- Sudrajat, A. W. (2020). Model Sistem Informasi Pendampingan UMKM. *Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Komunikasi* Vol. 3 No. 2, 1-7.
- Suhombing, N. L. (2018). Model Pendampingan UKM di Kota Tangerang. *Sembadha Volume 01 No. 01*, 84-90.
- Susanti, E. A., Hanafi, I., & R. A. (2013). Pengembang Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 No.4, 31-40.
- Wibowo, A. P., Dahiri, Ramiayu, D. D., Octavia, E., Zahara, E. L., Risandi, L. S., . . . Wijayanti, S. A. (2021). Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Yunani, A., Pradana, H. A., Rahmatullah, A., Maulida, S.,

& Chairina. (2022). Kajian Model Pengembangan Inkubator Bisnis di Kota Banjarmasin. Banjarmasin: Barenlitbangda Kota Banjarmasin.